

# FENOMENA KELAS PENARI WAYANG WONG DI YOGYAKARTA PADA MASA LAMPAU (1823—1855)

*R.M. Momo Pramutomo\**

## ABSTRACT

This article discusses the phenomena of groups of dancers in Yogyakarta in the past (1823-1855). The discussion includes the aspects of social history. Particular reference is given to a Chinese captain, Tan Jin Sing, who inspired the use of dancers as political satire within the sultan palace. This article presents a comprehensive study of dance history from different perspective. The dancer classes in the court of Yogyakarta Kraton can be recognized from one of the most influent phenomena in historical court dance in the Yogyakarta Palace.

*Key words:* political satire, groups of dancers, inspired, history, court.

## PENGANTAR

**S**tudi historis, seni pertunjukan Wayang Wong gaya Yogyakarta membuktikan bahwa bentuk kesenian istana ini merupakan bentuk kesenian yang penuh dengan gemerlap serta nuansa kultus kemegahan budaya aristokrat Jawa. Satu hal yang mungkin tidak pernah ditelusuri lebih jauh dalam kualifikasi tersebut adalah aspek penari sebagai aktor seni pertunjukan menjadi bagian paling esensial dalam sebuah penyajian yang seutuhnya. Sebagai aktor pelaku pertunjukan, aspek yang satu ini harus disadari keberadaannya secara sungguh-sungguh, karena statusnya yang sangat vital.

Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana V (1823—1855) telah ada fenomena menarik di seputar pembagian klasifikasi penari Wayang Wong di Kraton Yogyakarta. Klasifikasi tersebut ditengarai dengan

perbedaan teknik menari, dan bukan bersifat kebetulan jika fakta ini menjadi fenomena menarik untuk dicermati bersama. Kalaupun diperkirakan terdapat kaitan erat dengan kondisi-kondisi sosial politik masa itu, perlu diselidiki seberapa jauh faktor mobilisasi kelompok penari itu menjadi unsur terpenting. Dalam kaitan ini, figur Hamengku Buwana V sebagai individu yang paling berperan dalam pembentukan kelas penari akan ditelusuri latar belakang yang melingkupinya. Beberapa sumber tradisional menuturkan sangat baik tentang goncangan-goncangan politik yang menyertai proses pemerintahan raja kelima Yogyakarta ini. Di samping kegemarannya bermain wayang dan tari, sultan ini sejak kecil selalu bermain peran dengan perbedaan karakter yang dipilihnya. Seorang empu tari terkenal Yogyakarta, Pangeran Soerjobrongo, seperti dikutip Fred Wibowo tahun 1981 menuliskan pertama kali ide pembentukan kelas penari Wayang Wong dilakukan

\* Staf Pengajar Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta.

Hamengku Buwana V, dengan nama kelas masing-masing; *ringgit cina*, *ringgit gncik*, dan *ringgit gupgrmen*. (Wibowo, ed., 1981: 102). Dituturkan pula, kelompok pertama mengadakan latihan dan pertunjukan di Bangsal Kemagangan, bagian selatan istana. Kelompok penari kedua berlatih dan mengadakan pertunjukan di Bangsal Trajumas, yang terletak di sebelah utara istana. Sementara itu, kelompok penari ketiga merupakan penari-penari utama yang mengadakan latihan dan pertunjukan di Trtag Bangsal Kencana, yakni pusat istana. Kelompok penari pertama di sini dinyatakan sebagai kelompok pemula yang memiliki pemahaman teknis paling rendah. Diterangkan pula bahwa klasifikasi penari tersebut menunjukkan taraf potensi secara cermat karena cara ini mengenal adanya perpindahan kelompok yang naik statusnya dalam kelas di atasnya.

Sejalan dengan pembagian kelas penari tersebut, perlu dikemukakan pula sebuah dugaan yang pernah dilontarkan Jennifer Lindsay pada tahun 1991. Dinyatakan bahwa penamaan kelas penari di zaman Hamengku Buwana V menyerupai stratifikasi sosial atau golongan penduduk kota Yogyakarta pada masa itu, tetapi hal ini bukan merupakan refleksi dari konsep pembagian kelas berdasarkan ras (Lindsay; 1991:96). Masalah perbedaan sebutan bagi tempat pertunjukan dan latihan juga disinggung sedikit oleh Lindsay, tetapi tidak ditelusuri sejauh mana perbedaan sebutan nama lokasi tersebut. *Babad Ngayogyakarta* justru menyingkap secara terang-terangan perbedaan sebutan dalam pernyataan Pangeran Soerjibrongto. “... *denya sgmuan wayang wong, ing pura myang kmgagangan, tanapi Sri Pangantya, ...*” (*Babad Ngayogyakarta* Vol. III., SB MS. A 144, Canto 69; 49: *Asmaradana*).

Keterangan sumber *babad* tidak menyebutkan nama Bangsal Trajumas dalam pernyataan Pangeran Soerjibrongto, tetapi dengan nama lain *Sri Pangantya*. Selanjutnya, dalam nama sebutan Bangsal Kencana juga tidak disebutkan, tetapi dinyatakan sebagai *ing pura*. Dalam kenyataan, nama diri *ing pura* adalah istilah lama bagi istana pusat, yakni Bangsal Kencana, sedangkan *sri pangantya* merupakan suatu konsep

bangunan dengan halaman luas di sebelah utara istana pusat. Dalam konsepsi lama, keseluruhan kompleks halaman itu disebut Sri Pangantya. Pada kompleks ini terdapat dua bangsal, yakni Trajumas di sebelah timur dan Sri Panganti di sebelah barat. Jadi, perbedaan nama dalam lontaran Pangeran Soerjibrongto dengan deskripsi dalam *babad* tidak perlu dimasalahkan. Sampai sekarang, Bangsal Sri Panganti di sebelah barat masih dilestarikan sebagai panggung pertunjukan tari bagi konsumsi wisatawan setiap hari Minggu dari pukul 10.00 pagi hingga 12.00 siang.

Untuk mengantarkan tema utama artikel ini, yaitu kehadiran fenomena kelas penari pada masa lampau, akan diawali dengan faktor-faktor sosial politik yang menyertai kehidupan istana Yogyakarta selama pemerintahan Sultan Hamengku Buwana V Tak dipungkiri pula penetrasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda turut memicu terjadinya gejolak dan berbagai intrik sosial politik, karena struktur birokrasi kolonial telah memasuki aliran nadi struktur birokrasi tradisional. Hal ini juga merupakan bukti dari asumsi adanya penetrasi yang berlangsung secara perlahan, tetapi berdampak luas, termasuk dampak bagi pembentukan kelas penari yang menyerupai pembagian stratifikasi sosial penduduk Yogyakarta. Sebagai fenomena kultural, kiranya dapat diketahui akibat simbolis yang ada dalam klasifikasi penari di istana Yogyakarta saat itu. Beberapa permasalahan berikut ini merupakan rumusan yang diacu dalam sebuah pencermatan fenomena kelas penari di Kraton Yogyakarta zaman Hamengku Buwana V (1823—1855). Adakah korelasi konsep sosial dengan sistem stratifikasi sosial menurut ras di zaman Hamengku Buwana V memberi pengaruh penting dalam sebutan nama diri tiap-tiap kelas penari saat itu? Jika, memang benar demikian, dasar-dasar apakah yang turut mendukung pendapat Jennifer Lindsay, yang diacu dari Pangeran Soerjibrongto dan R.M. Soedarsono? Adakah fenomena sosial politik yang mendasarinya sehingga kelas penari *ringgit cina* ditempatkan pada kelas terendah, *ringgit gncik* di tengah, dan *ringgit gupgrmen* berada pada tingkat paling tinggi?

Pada awal pencermatan artikel ini, pendekatan sejarah sosial dan politik birokrasi istana Jawa masa lampau sangat penting dikemukakan lebih dulu. Hal ini juga untuk menguji asumsi Lindsay lebih dari sepuluh tahun lalu, tentang indikator sosial politik dalam pembentukan kelas penari di masa Sultan Hamengku Buwana V. Pandangan Lindsay dengan mengacu perbedaan tingkatan teknik menari sangat dipengaruhi oleh pernyataan Pangeran Soerjibrongto dan Soedarsono dalam melihat kehadiran fenomena kelas penari Wayang Wong di era Hamengku Buwana V. Lebih jauh dinyatakan bahwa *ringgit gupgrmen* adalah penari pemerintah yang merupakan penari-penari terbaik, *ringgit gncik* adalah penari dengan kemampuan teknik menengah, serta *ringgit cina* sebagai penari-penari berkemampuan terendah (Lindsay, 1991:96). Sebutan *ringgit* bagi status seorang penari Wayang Wong sudah menjadi konvensi pada tradisi seni Wayang Wong. Seorang peraga atau aktor Wayang Wong di Kraton Yogyakarta bukan disebut sebagai penari (Jw: *pambgksa*), melainkan *ringgit* sebagaimana mengikuti konvensi yang ada dalam tradisi wayang kulit karena Wayang Wong adalah personifikasi dari Wayang Kulit (Periksa G.B.P.H. Soerjibrongto dalam Wibowo, Ed., 1981:46-48). Jelas sekali, pandangan ini menampakkan indikator yang menyerupai stratifikasi sosial penduduk Yogyakarta. Langkah heuristik yang lazim dalam penentuan sumber dapat dikaji dalam keterangan-keterangan sumber tradisional maupun arsip yang masih dapat dilacak. Asumsinya di dalam suatu fakta sosial di wilayah hukum pembagian penduduk asing yang ada di Yogyakarta turut mengilhami pembentukan nama diri kelas penari yang dicetuskan pertama kali oleh Sultan Hamengku Buwana V.

Pencermatan dalam heuristik telah dilakukan secara kritis dengan membandingkan fenomena umum yang ada dalam kelas sosial penari yang diperoleh melalui proses organisasi sosial. Dalam proporsi pendekatan kritis ini, tak dapat dikesampingkan bahwa proses pembentukan sistem kelas dipengaruhi pula oleh sistem stratifikasi sosial. Kelas sosial itu sendiri dapat dibatasi dalam sebuah

tipe organisasi sosial. Pernyataan Olsen dapat membantu pendekatan ini; dengan menyebut sebuah tipe organisasi sosial, kelas memiliki faktor utama perbedaan-perbedaan dengan kelas lainnya, dan kesamaan-kesamaan di dalam kelas yang sama.

“... class is one of the most ambiguous concepts in sociology, and almost everyone gives it a slightly different meaning. It is usually associated with the phenomenon of social stratification, but in practice it refers sometimes to purely economic condition sometimes to social prestige, and difference, sometimes to social power, sometimes to people who share common interests and values, sometimes to populations, to abstract statistical categories, and frequently to several of these ideas in combinations (Olsen, 1975; 88).

Pandangan di atas menempatkan proporsi kelas sosial dalam pandangan umum. Menurut model pandangan tersebut, Lindsay tidak pernah menguji penyebab pembentukan kelas yang telah diacu dari Pangeran Soerjibrongto maupun Soedarsono. Jika diperhatikan, kiranya konsepsi terhadap kelas penari tidak seluruhnya dipenuhi dalam pembentukan kelas penari istana Yogyakarta di masa Hamengku Buwana V. Lindsay pun hanya mengajukan penilaian, bahwa istilah-istilah kelas penari Wayang Wong tersebut tidak menggambarkan pembagian ras, tetapi sekadar menggambarkan derajat kemampuan menari. Penggunaan istilah ras itu hanya menunjukkan derajat kemampuan, menggambarkan betapa pembagian kelas menurut stratifikasi sosial bervisi ras sudah penting pada masa Hamengku Buwana V (1823-1855).

Sampai dengan pendekatan ini, kiranya pembahasan berikut akan mencoba mencermati alasan-alasan khusus. Salah satu alasan itu telah diacu dalam pembentukan kelas penari berdasarkan tingkatan kemampuan teknis, dan faktor-faktor yang mendasari penyebutan istilah kelas itu sendiri. Perumusan ini diharapkan akan memperkuat adanya alasan sosial politik

yang merefleksikan gradasi artistik pada pembentukan teknik menari dan penempatan sebuah kelas penari kualifikasi estetis tertentu di masa lampau. Sudah barang tentu, pendekatan ini disertai dengan berbagai kemungkinan tingkatan prestise penduduk menurut ras yang diasumsikan sebagai prestasi estetis yang mempengaruhi faktor teknis dalam masing-masing kelas penari di masa Hamengku Buwana V.

### FENOMENA KELAS PENARI WAYANG WONG DI YOGYAKARTA PADA MASA LAMPAU

Beberapa konsepsi yang dilontarkan Olsen agak membantu pembatasan yang dimaksud dalam pembentukan sebuah kelas. Secara umum, kelas sosial itu sendiri diartikan sebagai sebuah tipe organisasi sosial yang disatukan dan diikat secara agak longgar yang didasarkan pada kekuasaan yang sama, *privileges* yang sama, dan prestise yang sama dari para anggotanya (Olsen, 1975:88). Sehubungan dengan pandangan ini, konsepsi kelas mengandung adanya perbedaan-perbedaan dan standar hidup. Dalam menyikapi sebuah faktor perbedaan, Olsen menyarankan bahwa adanya perbedaan itu tidaklah mutlak. Oleh karena itu, secara politis akan disandingkan dengan konsepsi perbedaan-perbedaan yang tidak mutlak dalam pernyataan Maurice Duverger. Hal ini dikarenakan di dalam soal-soal tertentu kelas-kelas yang berbeda dapat saling melengkapi dalam proporsinya masing-masing (Duverger, 1985:216). Lebih jauh dikatakan pula bahwa cara hidup dapat mempunyai aspek-aspek yang tidak patut, cara hidup tertentu dianggap lebih tinggi dari yang lain karena keuntungan atau prestise yang dinikmatinya.

Dari anggapan terakhir ini, dapat disarikan sebuah uraian pokok, yakni fenomena kelas penari Wayang Wong di zaman Hamengku Buwana V merupakan salah satu mode kreasi artistik yang dipengaruhi oleh intrik sosial politik saat itu. Untuk mengawali analisis tulisan ini, Carey telah menunjukkan sebuah cara dalam menempatkan faktor fenomena sejarah dan pembagian stratifikasi

sosial menurut ras dalam sejarah sosial penduduk Yogyakarta di masa Hamengku Buwana V. Dinyatakan bahwa di awal Abad XIX telah ada beberapa golongan penduduk asing yang menetap di wilayah kerajaan Sultan. Untuk golongan penduduk Cina dan keturunannya telah ada beberapa di antaranya yang memiliki pekerjaan tetap dan bervariasi. Orang yang bertanggung jawab atas seluruh masyarakat Cina di wilayah tersebut adalah dua orang kakak beradik, yakni Tan Djin Sing di wilayah Yogyakarta dan Tang Tin Sing yang diberi nama *Kapiten Cina*. Jika Jin Sing kemudian menjadi kapiten Cina di Yogyakarta, maka Tin Sing menjadi pengampu wilayah Paduresa, Temanggung. Di bawah kedua orang Kapiten Cina ini terdapat sebanyak 48 orang penjaga gerbang tol, 219 kuli yang dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan pada gerbang-gerbang tol tersebut, 397 orang pedagang serta pedagang perantara, 36 orang yang menyewakan tanah, 10 orang juru tulis, 3 orang guru, 3 orang pemilik pabrik gula, 2 orang tukang gambar, 2 orang tukang kayu, tukang jagal, dan beberapa anak usia akil baliq yang masih tinggal bersama orang tua mereka (Carey, 1985:38).

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, sangat tidak mungkin memandang segi ekonomi orang Cina ditempatkan dalam strata paling bawah. Oleh karena tingkat profesi yang bervariasi itu, sungguh mustahil dikatakan bahwa, orang-orang Cina itu dikategorikan sebagai kelompok sosial rendah atau melarat. Dari pencermatan Carey pula, diperoleh keterangan tentang orang-orang Cina tersebut akhirnya tampil sebagai pembayar pajak yang patuh. Kenyataan menunjukkan bahwa sampai dengan masa pemerintahan Hamengku Buwana III (1812 - 1814), orang-orang Cina semakin bertambah kuat secara ekonomi. Namun demikian, salah satu simpulan Carey sangat menarik untuk dicermati lebih dalam. Dikatakan bahwa kemungkinan besar adanya serangan tentara Inggris secara besar-besaran (*Geger Sgépehi*) di zaman Hamengku Buwana II serta warisan khusus sebagai akibat serangan tersebut merupakan awal kebencian dari orang-orang Jawa, terutama

kalangan atas terhadap orang-orang Cina (Carey, 1985:54).

Untuk mengkaji asumsi Carey ini, akan dicermati secara detail sosok Tan Jin Sing sebagai figur sentral yang bertanggung jawab atas seluruh penduduk Cina dan keturunannya di wilayah kerajaan Sultan saat itu. Sebagai seorang Kapiten Cina, Jin Sing digambarkan oleh Carey sebagai pribadi yang cerdas dan mudah bergaul. Menjelang masa akhir pemerintahan Hamengku Buwana II tahun 1812, ia mengalami mobilitas sosial secara dramatis dengan langsung terlibat di dalam persaingan-persaingan internal antar elite dan intrik politik yang meruncing di antara Putera Mahkota (calon Hamengku Buwana III) dan Sultan Hamengku Buwana II (Carey, 1985:55). Ia dikenal pandai berbahasa asing, baik bahasa Belanda maupun Inggris, serta bahasa Hokkian, Melayu dan Jawa. Keahliannya itu menyebabkan ia bertindak sebagai perantara perundingan antara Putera Mahkota dengan wakil Inggris di Yogyakarta. Salah satu risiko politik diambil Jin Sing ketika ia bertindak sebagai utusan rahasia Putera Mahkota dan mengakibatkan konspirasi politik adanya jaminan wakil Inggris untuk Putera Mahkota yang ingin menggantikan ayahnya sebagai raja Yogyakarta. Ini juga sebuah tragedi politik istana dengan serbuah tentara Sepoy awal tahun 1812 yang berakibat penangkapan Hamengku Buwana II untuk kemudian diasingkan di Sri Langka.

Benar sekali Tan Jin Sing telah berjasa kepada Putera Mahkota dan dianugerahi gelar Tuménggung Sécadiningrat sebagai birokrat istana berpangkat Bupati dan bertugas sebagai pembantu khusus Raden Tuménggung Ráksanegara di kantor Wdana Bandar (Carey, 1985:55). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tan Jin Sing telah naik statusnya dalam sebuah elite birokrasi istana, dengan mengalami mobilitas sosial secara vertikal. Status sosial yang begitu tinggi ini dapat dipandang secara drastis. Kenaikan seorang Cina dalam kedudukan birokrasi orang-orang Jawa kalangan istana sama sekali tidak pernah mengalami pendahulunya di Kraton Yogyakarta. Tentu pula, peristiwa ini menimbulkan kekesalan dan kemarahan di beberapa kelompok

Pangeran dan pejabat tingkat Bupati di istana Yogyakarta.

Kondisi pasca mobilitas Tan Jin Sing semakin diperparah dengan perubahan sikap yang berlebihan. Selain cenderung angkuh, ia juga menuntut diberikannya hak istimewa, termasuk tuntutan untuk membentuk kelompok penari *bághaya* sendiri di rumahnya, dan duduk sebaris dengan kelompok Pangeran jika ada resepsi kenegaraan penting di istana. Keadaan ini semakin diperparah dengan tuntutan memberi gelar *raden ayu* kepada istrinya yang bukan dari kalangan bangsawan, serta sikap *sémbah* bagi setiap utusan keraton yang akan menghadap di rumahnya (Carey, 1985:79). Berbagai celaan dan cercaan datang dari kalangan elite Jawa datang kepada alamat Tan Jin Sing. Hal ini menjadi bukti adanya perasaan tidak senang yang ditumpahkan kepada seorang Kapiten Cina yang telah mengganggu ketertiban elite birokrasi istana. Selain para Pangeran, beberapa birokrat berpangkat *bupati nayaka* mulai menunjukkan sikap yang muak terhadap cara Jin Sing mempertinggi martabat statusnya. Kebencian memuncak setelah Hamengku Buwana III wafat tahun 1814 karena berarti satu-satunya pelindung Tan Jin Sing sudah tidak ada lagi. Statusnya segera berubah drastis. Di samping pemecatan yang tak terhindarkan, kehidupan keluarganya pun sangat merana hingga tidak diketahui nasibnya setelah penobatan Sultan Hamengku Buwana IV.

Penempatan fenomena Tan Jin Sing sebagai Tuménggung Sécadiningrat di era kolonialisme Inggris (1812 - 1814) merupakan perspektif historis terpenting dalam melihat warisan khusus adanya faktor kebencian orang Jawa terhadap orang Cina saat itu. Pengganti Hamengku Buwana III juga tidak memerintah terlalu lama. Bukti adanya faktor kebencian itu masih membekas hingga cucu Hamengku Buwana III, yakni Hamengku Buwana V, ketika mulai memerintah secara penuh pada tahun 1836 (*Sékrat Babad Momana*, t.t.:47-51). Tidak lagi para Pangeran dan pejabat istana berpangkat Bupati, tetapi para pegawai desa (Jw: *déngang*) dan para pengumpul pajak (Jw. *bákgól*) juga mulai menunjukkan sikap kebencian kepada golongan

penduduk Cina yang dianggapnya tuan-tuan baru. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian tersebut, dapat dinyatakan bahwa landasan pemikiran tentang penempatan orang-orang Cina dalam status paling rendah menurut orang Jawa saat itu lebih cenderung pada alasan-alasan politis. Dalam acuan terdahulu, tidak mungkin menempatkan strata mereka dalam kedudukan paling bawah secara ekonomi. Untuk alasan ini, faktor ekonomi dalam status kelas penari yang dipengaruhi nama penduduk Kasultanan saat itu, tidak banyak diketahui sebagai faktor yang determinan. Hanya disebabkan penempatan status dalam kelas sosial penduduk saat itu, kelas sosial yang dianut adalah stratifikasi sosial menurut ras. Dalam bab ini, sebenarnya golongan penduduk golongan asing dibagi dalam kategori-kategori: Eropa, Timur Asing (termasuk Arab dan India) serta Cina. Selain itu, faktor khusus adanya alasan mobilitas sosial seorang Cina dalam birokrasi elite Jawa pada kasus Tan Jin Sing, dapat dianggap mengganggu stabilitas birokrasi primordial elite Jawa di Istana Yogyakarta. Sangat relevan dengan beberapa alasan tadi, tak dapat dikesampingkan bahwa orientasi simbol status yang dianggap paling prestise adalah gelar yang diberikan dari istana yang turut menempatkan seseorang pada peranan sosialnya (dapat juga politik).

Sementara itu, pandangan orang Jawa terhadap penduduk golongan Timur Asing (termasuk orang Arab dan India) kemungkinan besar lebih didasarkan pada besar kecilnya dampak sosial politik yang timbul dalam kalangan elite Jawa (terutama kalangan istana). Selain itu, memang tidak diketahui secara pasti fenomena unik yang menyerupai sosok Tan Jin Sing dalam golongan penduduk Timur Asing selama periode di atas. Sebuah informasi dari sumber *Sġrat Babad Momana* hanya menerangkan bahwa sampai dengan tahun 1909 (masa pemerintahan Hamengku Buwana VII) masih ada sejumlah 38 orang dari golongan penduduk Timur Asing yang mengabdikan di Kraton Yogyakarta sebagai *abdi dalġm punakawan ġncik* (*Sġrat Babad Momana*, t.t.:103). Keterangan ini mengandung dua penafsiran yang dapat dijadikan sumber acuan. Pertama, tentu saja mengacu

kepada sejumlah orang Timur Asing yang memang benar-benar menjadi pelayan istana dan kedua, dapat juga mengacu kepada sejumlah kelompok penari dalam kelas *ringgit ġncik* yang mengadakan pertunjukan di Bangsal Sri Manganti. Berkenaan dengan keterangan di atas, pandangan orang Jawa (terutama kalangan elite birokrasi) terhadap golongan Timur Asing lebih baik dibandingkan dengan pandangannya terhadap penduduk golongan Cina.

Untuk memperjelas pandangan orang Jawa terhadap golongan penduduk Timur Asing saat itu, dalam artikel ini akan dikemukakan posisi sosial penduduk lokal. Upaya ini untuk menarik garis ikatan primordial antara raja dengan rakyat serta kerajaannya. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah bagian Selatan telah dipengaruhi kekuasaan birokrasi kolonial Belanda. Demikian pun keadaannya di wilayah-wilayah *vasal*, termasuk kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Kasultanan Yogyakarta di masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana V secara langsung di bawah pengaruh birokrasi kolonial Belanda yang kuat.

Sesuatu yang kemudian muncul secara tidak disadari, yakni adanya bentuk ambiguitas pengakuan dalam eksistensi struktural, baik pada struktur lama atau istana (birokrasi tradisional Jawa) maupun struktur baru atau *gupġrmen* (birokrasi kolonial Belanda). Pada satu sisi, struktur lama (kraton) masih memiliki ikatan kuat dengan pengakuan tradisional para *kawula dalġm*, dan di sisi yang lain terdapat struktur baru (*gupġrmen*) yang mulai manacapkan kakinya secara kokoh dalam praktik politik birokrasi di wilayah primordialisme elite kraton. Indikator utama kokohnya *gupġrmen*, ditandai dengan aturan baru bagi golongan penduduk asing yang tinggal di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Aturan hukum ini disusun dengan gradasi sosial menurut ras yang menempatkan orang Eropa berada dalam status paling atas, kemudian golongan Timur Asing (termasuk Arab dan India) dalam status menengah, dan golongan Cina dalam status terendah. Secara psikologis, dasar-dasar penggolongan status penduduk asing itu sangat mempertimbangkan faktor emosional orang-orang

Jawa (terutama di kalangan elite birokrasi) yang telah diakibatkan oleh *historical accident* pada faktor warisan khusus kebencian orang Jawa terhadap golongan Cina di masa lampau. Jadi, jelas terdapat motif politik pada stratifikasi sosial dalam hukum pembagian penduduk asing di masa Hamengku Buwana V. Posisi khas *kawula dalǵm* dalam sistem stratifikasi sosial ini tidak dimasukkan dalam aturan hukum pemerintah kolonial Belanda. Cara yang sama dapat dilihat dari kelihaihan birokrasi *gupǵrmen* dalam menjaga eksistensi struktur lama (keraton) untuk terus mendapat pengakuan simbolis dari *kawula dalǵm*. Bentuk simbolis yang ditunjukkan dalam berbagai peristiwa kenegaraan di kerajaan ini sering pula memiliki akibat politis. Hal ini berarti pula sebuah pengesahan terhadap penduduk Jawa masuk dalam kekuasaan birokrasi *gupǵrmen*, karena pemerintah kolonial secara politik telah berada di atas struktur lama. Kekuasaan itu termasuk dalam pembagian tiga golongan penduduk asing berdasarkan stratifikasi sosial menurut ras.

Pernyataan ini juga memperjelas posisi khas orang Jawa karena meskipun pengesahan tentang pembagian golongan penduduk asing tersebut diatur dalam sistem hukum pemerintah kolonial Belanda, tetapi demi menjaga hubungan emosional dengan kelompok elite Jawa, kriteria stratifikasi sosial berdasarkan ras di atas sangat dipengaruhi oleh cara pandang orang Jawa terhadap golongan penduduk asing di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Kalaupun itu diasumsikan sebagai bentuk toleransi dalam kolonialisme Belanda, hal ini masih perlu dibuktikan dalam kajian yang lebih mendalam. Hanya saja telah diketahui bahwa, selama masa Hamengku Buwana V (1823 - 1855) adanya kontak budaya yang sangat pesat tak dapat dihindarkan. Paling tidak, dengan melihat kisah hidup Sultan kelima ini saja, kiranya dapat dimaklumi adanya pengaruh kolonialisme telah dialami Sultan pribadi sejak usia kanak-kanak.

Dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta, Hamengku Buwana V merupakan raja muda sewaktu dinobatkan di tahun 1823. Saat itu, ia masih berusia 3 tahun sehingga pada waktu penobatan masih digendong

ibunya Kangjng Ratu Agǵng dan didampingi oleh Residen Yogyakarta saat itu (*Babad Ngayogyakarta* Vol. II t.t.; *Asmaradana*, Canto 50-60). Di bawah Dewan Perwalian, raja kecil ini menjalani kehidupan ambiguitas birokrasi hingga ia menikah di tahun 1834. *Sǵrat Babad Momana* menerangkan bahwa "1761 taun Wawu, krama dalm dhaup putri Purwangaran, inggih Kangjǵng Ratu Kǵncana" (*Sǵrat Babad Momana*, t.t.:27). Setelah menikah, Sultan kelima baru masuk dalam politik birokrasi sesungguhnya di tahun 1837 dengan melalui penobatannya yang kedua (*Sǵrat Babad Momana*, t.t.: 27). Demikianlah, selama masa pemerintahannya, Hamengku Buwana V tidak pernah terlepas dari kehidupan intrik birokrasi yang bernuansa ambiguitas. Satu hal yang secara otonom benar-benar di bawah kekuasaan langsung Sultan hanya pada bidang-bidang nonpolitik. Secara institusional, bidang-bidang ini memang berada di luar pengaruh praktik birokrasi *gupǵrmen*, seperti lembaga *abdi dalm punakawan*, *abdi dalǵm bǵdhaya*, serta *abdi dalǵm ringgit* dan pujangga. Bahkan, *abdi dalǵm Prajurit* pun telah dimodifikasi dari lembaga fungsional menjadi seremonial selama periode awal Hamengku Buwana V (*Babad Ngayogyakarta* Vol. III t.t.; *Dandhanggula*, Canto:34).

Sebagai reaksi budaya akibat menyempitnya peran politik Sultan, dibuatlah imbang-angan struktural dalam kreasi kelas penari istana yang menyerupai nama stratifikasi sosial penduduk Kasultanan Yogyakarta saat itu (*Ngayogyakarta Pagelaran*, t.t.:189). Dalam bab ini, sebenarnya diketahui sikap Sultan menandingi bentuk penetrasi kolonialisme melalui simbol artistik. Dalam keterbatasan-keterbatasan teknis, Sultan berhasil menyerap sistem pengetahuan yang didapatkan dari kontak budaya dengan *gupǵrmen*, kemudian mempolitisasi lembaga penari di bawah *abdi dalǵm ringgit* dalam perwujudan simbol status. Secara kebetulan, kelihaihan artistik ini disertai sindiran politik dengan menempatkan simbol status kelas penari itu menyerupai miniatur klasifikasi penduduk asing yang tinggal di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Kalau ini dijelaskan sebagai metode pertahanan moral politik, proses politisasi lembaga kelas penari ini diikuti lahirnya

sebuah sastra *lakon* Wayang Wong yang diciptakan Hamengku Buwana V tahun 1837, yakni *Petruk Dados Ratu* (G.B.P.H. Soerjibrongto dalam Wibowo, Ed., 1981:46-48). Kini menjadi jelas bagaimana fakta sosial politik di masa lampau itu telah ditransformasikan ke dalam simbol artistik oleh Sultan kelima Yogyakarta.

## SIMPULAN

Tindakan Hamengku Buwana V dalam menandingi struktur organisasi kelas penari bukan merupakan indikator yang seperti dalam gambaran Norbert Elias terhadap kurangnya penguasaan diri individu akibat tekanan sosial politik, apalagi jika disebut kurang mengenal sivilisasi. Bukan seperti itu keadaannya karena justru imbalan artistik yang dibenturkan dengan imbalan politik dapat menghasilkan tingkat sofistikasi struktural dalam proses birokrasi kelembagaan nonpolitik saat itu. Tindakan sejenis telah ditempuh Hamengku Buwana V sebagai bentuk konsekuensi logis dalam statusnya sebagai puncak hierarki elite Jawa sebab resiko ancaman diturunkan dari tahta pernah terjadi pada tahun 1843 (Lindsay, 1991:98).

Pada akhirnya, sejarah sosial era pemerintahan Hamengku Buwana V telah memberi bukti fenomena kelas penari istana yang dibentuk atas pertimbangan artistik sekaligus politis (dalam bentuk *satire*). Pembentukan kelas penari saat itu memiliki tendensi ganda. Di satu sisi kelas penari merupakan simbol kelas yang menjadi sindiran bagi pemerintahan kolonial Belanda (*gupgrmen*). Pada sisi yang lain, kelas penari dapat menjadi model artistik karena tak dapat dipungkiri jika masing-masing kelas penari telah ditentukan kualitas estetikanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arnold Hauser yang menyatakan bahwa setiap keanggotaan kelas tidak pernah secara langsung dan secara eksklusif menentukan karakter stilistik serta kualitas esestetik dari kegiatannya (Hauser, 1979:574). Dengan demikian, ada kemungkinan berpindahnya seseorang ke dalam kelas yang lebih tinggi. Kualitas

estetik dalam kadar teknik menari seseorang akan menentukan naiknya status seseorang ke dalam kelas di atasnya.

Sampai di sini, kajian fenomena kelas penari istana Yogyakarta di masa Sultan Hamengku Buwana V telah diungkapkan sebagai studi awal dari sejarah seni pertunjukan istana Jawa di masa lampau. Kiranya, berbagai korelasi kesejarahan masih memungkinkan dicermati secara lebih mendalam, untuk menelusuri peristiwa atau fenomena yang belum diuraikan dalam artikel ini. Salah satu kemungkinan itu dapat dipertimbangkan sebagai kaitan faktor ekonomi yang diakibatkan oleh pembentukan kelas penari. Secara khusus, penulisan artikel ini juga menjadi bagian terpenting bagi pengkajian seni pertunjukan yang masih banyak tercecer di berbagai aspeknya. Dari uraian analisis tulisan ini, ada hal yang dapat ditegaskan dalam relasi simbolis antara prestise status sosial penduduk asing di wilayah Kasultanan dengan prestasi estetis dalam kelas penari Wayang Wong di zaman Hamengku Buwana V. Pada gilirannya, pencermatan dalam artikel ini dapat digunakan sebagai wacana pemikiran yang menempatkan periode Hamengku Buwana V sebagai periode yang unik dan dipenuhi berbagai peristiwa maupun intrik politik istana. Namun, justru ketajaman intrik di luar wilayah artistik tersebut, kiranya dapat ditemukan nuansa-nuansa artistik yang memperkaya mode kreasi seni pertunjukan di zaman Hamengku Buwana V.

## DAFTAR RUJUKAN

- Babad Ngayogyakarta* Vol. I-III, Koleksi Museum Sana Budaya No. PBA 135, PBA 136, PBA 144A.
- Carey, Peter. 1985. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755–1825)*. Jakarta: Rustika Azet.
- Duverger, Maurice. 1985. *Sosiologi Politik*, Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Hauser, Arnold. 1979. *The Sociology of Art*. Terjemahan Kenneth J. Northcott. Chicago



- dan London: The University of Chicago Press.
- Lindsay, Jennifer. 1991. *Klasik, Kitsch, Kontemporer: Sebuah Studi Tentang Seni Pertunjukan Jawa*. Terjemahan Nin Bakdi Sumanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ngayogyakarta Pagelaran, t.t., Koleksi R.Ng. Kartahasmara.
- Olsen, Marvin E. 1975. *The Process of Social Organization*. New Delhi, Bombay, dan Calcutta: Oxford and IBH Publishing Co
- Serat Babad Momana*, t.t. koleksi Saemodjojo Mahadewa.
- Serat Bab Inyang Sinuwun Inyang Kaping Gangsal*. Koleksi Widya Budaya No. A 67.
- Soedarsono, R.M. 1997. *Wayang Wong: Drama Tari Ritual Kenegaraan di Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wibowo, Fred. Ed. 1981. *Mengenal Tari Klasik Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Dewan Kesenian Propinsi DIY.